

2024



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto
Jalan Raden Wijaya No. 60 Mojokerto
Jawa Timur. Telp. (0321) 321958

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini merupakan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati yang didalamnya memuat unsur-unsur Rencana Strategis, Rencana Kerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja).

Semoga LKjIP ini dapat menjadi evaluasi guna peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Sumbang saran dan koreksi dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan guna perbaikan laporan kedepannya.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Dasar Hukum	6
E. Aspek-aspek Strategis	8
F. Isu –isu Strategis /	9
Permasalahan utama	
G. Sistematika penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Strategi dan Arah	14
Kebijakan	
C. Perencanaan kinerja	18
D. Perjanjian Kinerja	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Pengukuran capaian kinerja /	30
sasaran	
B. Akuntabilitas keuangan	53
C. Data Prestasi yang diperoleh	68
pada tahun 2024	
BAB IV. PENUTUP	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Fokus utama instansi ini adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas lingkungan dan tata ruang.

Dinas PUPR menghadapi beberapa tantangan utama, seperti pemerataan infrastruktur yang masih menunjukkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air dan dampak lingkungan pembangunan, serta tantangan pendanaan akibat keterbatasan anggaran dalam mendukung proyek infrastruktur besar. Selain itu, kualitas SDM dan kepatuhan terhadap standar konstruksi perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pengawasan kualitas konstruksi. Pembangunan sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, namun pengelolaan sampah dan sistem drainase masih terbatas di beberapa wilayah.

Beberapa indikator kinerja menunjukkan keberhasilan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki. Pemerataan infrastruktur mencapai 80,57% dari target 81%. Pengelolaan sumber daya air telah memenuhi target dengan 100% luas daerah irigasi telah dilayani oleh jaringan irigasi. Akses terhadap air minum mencapai 95,48% dari target 95,50%. Pengelolaan sampah mencapai 9,54% dari target 10%. Sistem drainase mencapai 20,05% dari target 20%. Penataan bangunan gedung mencapai 47,77% dari target 20%, menunjukkan peningkatan kepatuhan. Namun, kemantapan jalan hanya mencapai 66,66% dari target 93% dikarenakan panjang jalan kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan seiring dengan pemberlakuan SK Status Ruas Jalan terbaru, dan tenaga konstruksi bersertifikasi mencapai 51,06% dari target 38%.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.419.398.477 dengan realiasi sebesar Rp. 372.793.243.693 (88,25%).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan berbagai program dengan tingkat realisasi anggaran yang bervariasi. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dialokasikan sebesar Rp 19,5 miliar dengan realisasi Rp 16,78 miliar atau 86,05%. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjukkan capaian yang cukup tinggi, yaitu 92,74% dari anggaran Rp 9,66 miliar dengan realisasi Rp 8,96 miliar. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional berhasil direalisasikan hampir sepenuhnya dengan capaian 99,33% dari anggaran Rp 1,45 miliar.

Selain itu, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah juga mencapai realisasi yang sangat baik, yakni 99,38% dari anggaran Rp 7,14 miliar. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar 91,69% dari anggaran Rp 11,64 miliar. Sementara itu, Program Penataan Bangunan Gedung mencatat capaian yang lebih rendah, yaitu 74,19% dari anggaran Rp 11,23 miliar dengan realisasi Rp 8,33 miliar. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya berhasil direalisasikan sebesar 87,50% dari anggaran Rp 335 juta.

Pada sektor infrastruktur jalan, Program Penyelenggaraan Jalan memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 334,19 miliar, dengan realisasi Rp 293,37 miliar atau 87,79%. Program Pengembangan Jasa Konstruksi mencapai realisasi 97,32% dari anggaran Rp 866 juta. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian 98,18% dari anggaran Rp 1,45 miliar. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga mencatat realisasi anggaran yang tinggi, yaitu 94,50% dari anggaran Rp 24,92 miliar.

Tingkat realisasi anggaran menunjukkan efektivitas yang cukup baik, dengan beberapa program mencapai lebih dari 90% realisasi. Dengan evaluasi yang lebih mendalam, diharapkan efisiensi dan efektivitas anggaran dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa langkah strategis diusulkan. Optimalisasi anggaran dan efisiensi program menjadi prioritas dengan menyusun skala prioritas proyek dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga konstruksi dan pegawai teknis. Penguatan sistem pengawasan dan regulasi dilakukan dengan

memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan tata ruang. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan diterapkan dengan integrasi teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengolahan limbah. Selain itu, digitalisasi tata kelola dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk perencanaan pembangunan.

Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan seperti kemantapan jalan dan pemerataan akses infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan perencanaan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif, diharapkan kinerja tahun mendatang dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. Infrastruktur yang baik dan penataan ruang yang terencana dengan baik mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif bagi masyarakat.

Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain juga dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan daerah perdesaan dengan akses terhadap infrastruktur yang masih terbatas, sementara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berada di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pemerataan dan perluasan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama bagi Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Di samping itu, Kabupaten Mojokerto juga menghadapi tantangan dalam hal **pengelolaan sumber daya air**, dengan kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan sektor pertanian yang mendominasi. Sistem irigasi yang terkelola dengan baik akan menjadi faktor penentu dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, peningkatan akses terhadap **air minum** yang layak serta pengolahan **air limbah domestik** menjadi penting untuk menjaga kualitas hidup dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, masalah **sanitasi dan pengelolaan sampah** juga menjadi isu yang perlu segera diatasi. Dengan pertumbuhan jumlah

penduduk dan urbanisasi yang pesat, kapasitas pengelolaan sampah di beberapa daerah masih terbatas, yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan sarana pengelolaan sampah yang efisien, serta meningkatkan sistem pengelolaan **drainase** untuk mengatasi masalah genangan air yang sering terjadi di area perkotaan.

Tantangan **lainnya** adalah **penataan bangunan gedung** dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap **Peraturan Bangunan Gedung (PBG)** dan **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** yang masih memerlukan perhatian khusus. Peningkatan kualitas bangunan gedung yang sesuai dengan regulasi dapat mencegah kerusakan dan kecelakaan yang berpotensi mengancam keselamatan publik.

Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga menghadapi kebutuhan untuk terus meningkatkan **kapasitas sumber daya manusia** melalui peningkatan kompetensi tenaga teknis, operator, dan analis konstruksi, agar mampu menangani berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik semata, tetapi juga oleh **kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang**. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar setiap pembangunan infrastruktur, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, agar pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga keberlanjutan ekologis dan sosial.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah mewujudkan misi ke 4 yaitu *“Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”* melalui penetapan indikator kinerja utama yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RENSTRA dan RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang kemudian diturunkan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah. Sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati Mojokerto dalam melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

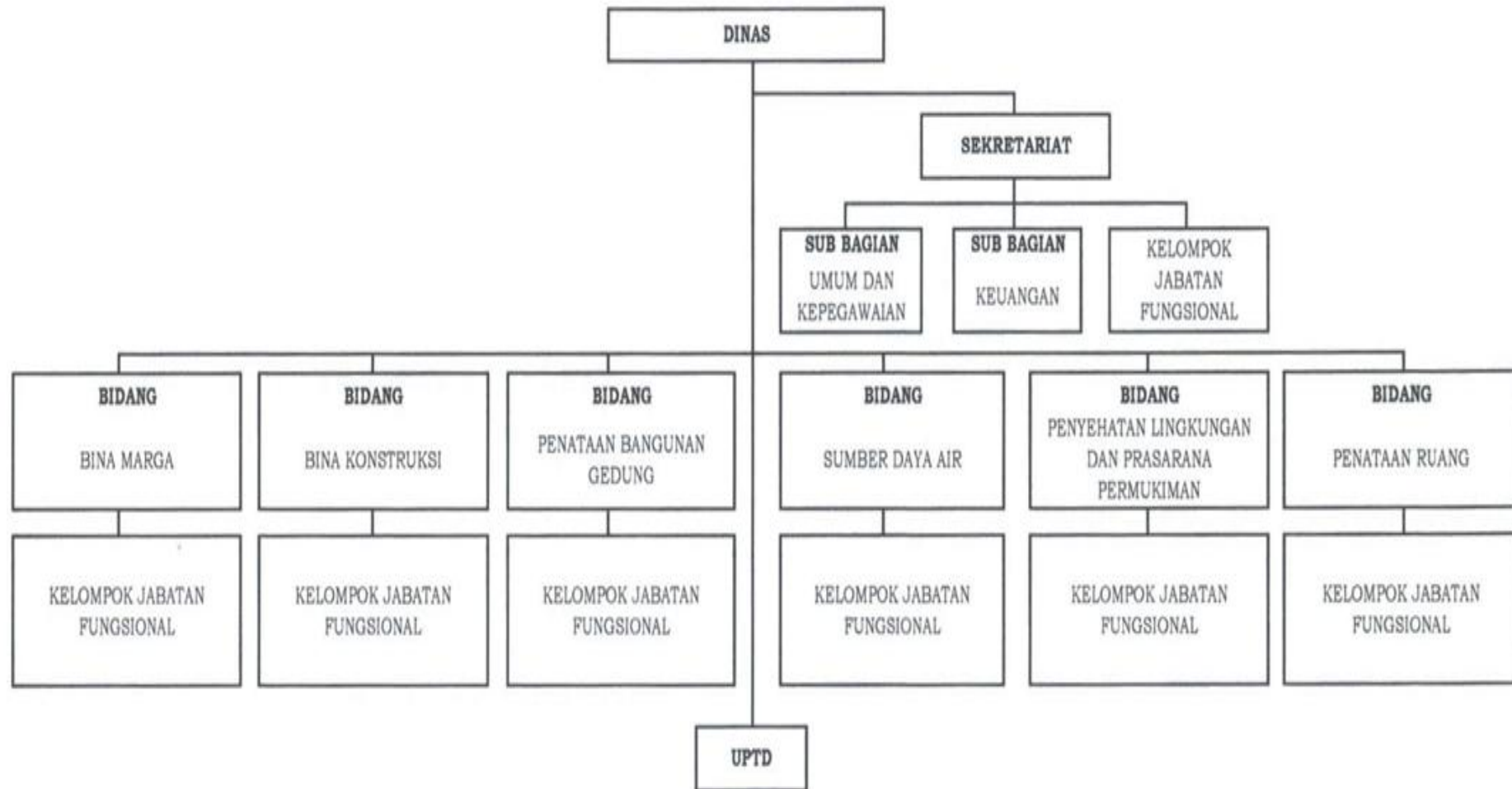
3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan dan telah dicapai sesuai Renstra Tahun 2021-2026 dan Perubahannya serta pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan;
2. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sehingga lebih efektif;
4. Dapat menginovasi kinerja dan berkompetisi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Juknis Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

E. Aspek – aspek Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PUPR menghadapi beberapa aspek strategis yang perlu dihadapi dengan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif.

Aspek-aspek strategis tersebut antara lain:

1. **Pemerataan Infrastruktur** : Kabupaten Mojokerto memiliki 1. wilayah yang terbagi antara daerah perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya harus diperhatikan secara adil di seluruh wilayah agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan.
2. **Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**: Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam, terutama air, harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem lokal.
3. **Tantangan Pendanaan**: Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas PUPR adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan prioritas pembangunan perlu ditentukan dengan cermat untuk mencapai hasil yang maksimal dengan dana yang terbatas.
4. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**: Agar dapat mengelola proyek-proyek infrastruktur dengan baik, Dinas PUPR harus memiliki SDM yang kompeten dan terlatih. Peningkatan kapasitas teknis bagi operator, teknisi, dan analis konstruksi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan konstruksi.
5. **Peningkatan Kualitas Tata Ruang**: Tata ruang yang baik akan menjadi fondasi untuk pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur

yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan regulasi yang ada, tetapi juga sejalan dengan rencana tata ruang daerah yang sudah disusun.

- 6. **Pengelolaan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten:** Dalam hal pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi, Dinas PUPR harus terus meningkatkan kapasitas dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap air bersih dan pengelolaan limbah.

F. Isu – isu strategis / Permasalahan Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto menghadapi sejumlah permasalahan utama yang cukup kompleks, yang memerlukan perhatian dan penyelesaian secara terintegrasi. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan kendala teknis atau administrasi, namun juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, serta lingkungan yang saling terkait. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi:

1. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek

Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan merupakan masalah yang sering kali dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Beberapa proyek tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan karena berbagai faktor, baik eksternal maupun internal.

- **Faktor Penyebab:**
 - **Masalah Cuaca:** Bencana alam seperti hujan lebat dan banjir seringkali menghambat proses pengerjaan konstruksi di lapangan, terutama untuk proyek-proyek yang membutuhkan pembangunan di luar ruangan.
 - **Masalah Logistik:** Distribusi material konstruksi yang terlambat atau tidak memadai sering kali menjadi hambatan. Proyek yang membutuhkan material khusus atau berkualitas tinggi sering kali menghadapi tantangan dalam penyediaannya tepat waktu.

- **Tantangan Administrasi dan Persetujuan:** Proses perizinan yang panjang dan rumit sering kali menyebabkan proyek terlambat dimulai atau dihentikan sementara, baik karena masalah teknis maupun legalitas.
- **Dampak:** Keterlambatan ini tidak hanya menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Proyek yang selesai terlambat juga berdampak pada masyarakat yang seharusnya sudah merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
- **Solusi:** Untuk mengatasi masalah ini, Dinas PUPR perlu memperbaiki perencanaan waktu dan alur administrasi yang lebih efisien. Penerapan teknologi dalam pengelolaan proyek (seperti sistem manajemen proyek berbasis aplikasi atau software) dapat membantu memantau kemajuan pekerjaan secara lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam mekanisme tender dan pengadaan barang/jasa yang lebih fleksibel dan efisien.

2. Kualitas dan Kepatuhan Terhadap Standar Konstruksi

Masalah terkait dengan **kualitas konstruksi** dan **kepatuhan terhadap standar bangunan** masih menjadi tantangan besar. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pembangunan gedung dan infrastruktur, namun sering kali pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- **Penyebab:**
 - **Keterbatasan Pengawasan:** Pengawasan terhadap proyek pembangunan sering kali kurang intensif, terutama di tingkat lokal dan pedesaan. Hal ini berisiko menyebabkan pembangunan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan.
 - **Kurangnya Pengalaman Tenaga Kerja:** Beberapa proyek menggunakan tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi yang cukup, sehingga berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.

- **Dampak:** Infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang kurang baik dapat berisiko menimbulkan kerusakan dalam jangka pendek, bahkan membahayakan keselamatan publik. Hal ini juga dapat menambah biaya pemeliharaan yang tinggi dan mengurangi umur pakai fasilitas yang dibangun.
- **Solusi:** Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang terlibat dalam konstruksi memiliki sertifikasi yang memadai. Dinas PUPR juga perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi kontraktor dan pekerja untuk meningkatkan kualitas konstruksi yang memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan.

3. Ketidaksesuaian Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Masalah ketidaksesuaian pembangunan dengan **rencana tata ruang** wilayah seringkali menjadi masalah besar, terutama dalam pengembangan kawasan yang pesat. Tanpa pengawasan yang ketat, beberapa proyek pembangunan dapat mengabaikan peraturan tata ruang, yang berisiko mengganggu keseimbangan ekologis dan mempengaruhi kenyamanan masyarakat.

- **Faktor Penyebab:**
 - **Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Tata Ruang:** Beberapa pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, masih kurang memahami pentingnya tata ruang dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini berisiko menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak terencana dengan baik.
 - **Ketidaktegasan dalam Pengawasan:** Pengawasan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang kadang terabaikan karena keterbatasan SDM dan anggaran.
 - **Dampak:** Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, seperti kepadatan penduduk yang tidak terkendali, bencana alam yang disebabkan oleh perubahan tata ruang (seperti banjir akibat hilangnya ruang terbuka hijau), dan kerusakan lingkungan.

- **Solusi:** Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Dinas PUPR juga harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Layanan Pengelolaan Sampah dan Drainase

Salah satu isu yang semakin mendesak adalah **pengelolaan sampah** dan **drainase** yang belum memadai di banyak wilayah, terutama di area perkotaan yang padat penduduk. Meskipun sejumlah fasilitas pengelolaan sampah telah dibangun, namun kapasitas dan distribusi layanan pengelolaan sampah yang ada masih sangat terbatas.

- **Penyebab:**
 - **Pertumbuhan Penduduk yang Cepat:** Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah dan drainase yang ada menjadi tidak lagi memadai.
 - **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat sering kali belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik, yang menyebabkan banyak sampah dibuang sembarangan.
- **Dampak:** Pencemaran lingkungan, banjir akibat drainase yang tidak berfungsi optimal, serta masalah kesehatan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang buruk.
- **Solusi:** Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah dan drainase, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik. Perlu juga adanya inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi, seperti sistem pemilahan sampah dan daur ulang yang lebih efisien.

5. Tantangan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas dan kualitas **sumber daya manusia (SDM)** menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan berbagai proyek pembangunan. Meskipun ada upaya untuk melatih tenaga kerja teknis dan profesional, namun kualitas SDM di bidang konstruksi dan penataan ruang masih menghadapi berbagai tantangan.

- **Penyebab:**
 - **Kurangnya Tenaga Terampil dan Kompeten:** Terutama di daerah pedesaan, sering kali sulit menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai dalam bidang konstruksi dan perencanaan ruang.
 - **Pelatihan dan Sertifikasi yang Terbatas:** Program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja teknis dan operator di Kabupaten Mojokerto masih terbatas, sehingga berisiko pada kualitas pekerjaan yang kurang optimal.
 - **Dampak:** Proyek yang tidak dikerjakan oleh tenaga ahli yang terlatih dapat menyebabkan hasil yang tidak memenuhi standar, serta meningkatkan risiko kesalahan konstruksi atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
 - **Solusi:** Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya program pelatihan dan sertifikasi yang lebih luas dan merata bagi para tenaga kerja di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Dinas PUPR perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta asosiasi profesi, untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap pelatihan yang relevan dengan kebutuhan proyek pembangunan.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;
- Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto untuk periode Tahun 2021 - 2026 dan penetapan kinerja untuk Tahun 2024;
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024;

A. Capaian Kinerja

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran. Pada lampiran dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta dokumen lain yang dianggap perlu untuk menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Perangkat Daerah dibuat dengan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu " *Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*" dan Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Misi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **Misi 4** yaitu " **Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan**". Adapun **Tujuan** yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Urusan Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah "**Mewujudkan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan**".

Dalam menentukan perencanaan kinerja tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mengacu rencana strategis dan berdasar pada tujuan yang merupakan *sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026* yaitu "**Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung**" dan sasaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tahun 2024 yakni :

TUJUAN :

Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung;

SASARAN :

Untuk mencapai tujuan " Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung ", maka ditetapkan sasaran :

1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah;
3. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air;
4. Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
6. Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik.
7. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
8. Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung;
9. Meningkatnya kemantapan jalan;
10. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
11. Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang.

Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

No	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Persentase Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, Bangunan Gedung Kondisi Baik x 100% 6	72,38%	72,88%	73,38%	73,88%	74,38%	74,38%

**Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	A	A	A	A
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	(Jumlah anggaran yang terrealisasi / Jumlah anggaran keseluruhan) x 100%	-	80%	85%	87%	90%
		Indeks profesionalitas ASN	Nilai indeks profesionalitas ASN	-	80	80	80	80
2	Optimasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terrealisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		-	1	1	1	1
3	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani jaringan irigasi	(Luas jaringan irigasi yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara / Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	(Jumlah masyarakat yang memiliki akses melalui SPAM / Total rumah tangga di kabupaten/kota) x 100%	-	86,87%	87,52%	88,82%	89,15%
5	Meningkatnya ketersediaan sarana persampahan	Persentase desa yang memiliki TPS/TPS3R	(Jumlah TPS/TPS3R yang tersedia / Jumlah desa di kabupaten) x 100%	-	18%	21%	25%	28%
6	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan	(Jumlah rumah yang memiliki akses ke IPAL / Total rumah tangga) x 100%	-	87,85%	88,12%	88,89%	89,34%

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	2022	2023	2024	2025	2026
7	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase	Persentase perkotaan yang memiliki sistem drainase	$(\text{Panjang drainase tersedia} / \text{Total kebutuhan drainase di kabupaten/kota}) \times 100\%$	-	18%	19%	20%	21%
8	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan	Rasio kepatuhan pemanfaatan IMB	$(\text{Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya} / \text{Jumlah IMB}) \times 100\%$	-	10%	11%	12%	13%
9	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan di kabupaten	$(\text{Panjang jalan yang mantap} / \text{Total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$	-	81,20%	82,20%	83,20%	84,20%
10	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi dengan sertifikasi	$(\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikasi} / \text{Total kebutuhan tenaga kerja konstruksi}) \times 100\%$	-	19,08%	24,81%	30,53%	36,26%
11	Mempertahankan kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang	$(\text{Jumlah kegiatan sesuai rencana} / \text{Total jumlah kegiatan}) \times 100\%$	-	100%	100%	100%	100%

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Ruang Kabupaten Mojokerto diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dijabarkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI IV	: Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum, dan bangunan gedung	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan kapasitas manajemen berbasis teknologi dan data.	1. Pengembangan sistem informasi perencanaan berbasis digital (e-planning dan e-budgeting).
		2. Penyelarasan program lintas sektor untuk efisiensi.	2. Penyusunan SOP yang terintegrasi dengan pengawasan internal.
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	1. Optimalisasi penggunaan sumber daya air dengan pendekatan berkelanjutan.	1. Penggunaan teknologi pengelolaan air berbasis Internet of Things (IoT).
		2. Pemanfaatan teknologi modern untuk rehabilitasi jaringan.	2. Rehabilitasi jaringan irigasi prioritas dengan pendekatan ramah lingkungan.
	Meningkatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	1. Sinergi lintas sektor untuk peningkatan akses air minum.	1. Penguatan Pokja Air Minum dengan pelibatan masyarakat.
		2. Fokus pada pengelolaan daerah rawan air secara holistik.	2. Pembangunan SPAM di wilayah dengan akses air terbatas.
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1. Pengembangan model pengelolaan sampah berbasis desa.	1. Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di desa-desa strategis.
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	1. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah.	1. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik berbasis komunitas.

		2. Integrasi pengelolaan air limbah dengan tata ruang wilayah.	2. Penyusunan aturan dan insentif untuk pelaku usaha yang mendukung pengelolaan air limbah.
	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1. Pembangunan drainase berbasis mitigasi banjir.	1. Pengoptimalan sistem drainase berbasis ekohidrologi.
		2. Pemeliharaan sistem drainase secara periodik dengan standar teknis.	2. Pengembangan infrastruktur drainase yang terintegrasi dengan penataan lingkungan.
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	1. Penegakan standar teknis bangunan yang berorientasi keselamatan.	1. Pembentukan database digital untuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
		2. Mendorong digitalisasi perizinan dan pengawasan bangunan.	2. Penguatan pengawasan berbasis teknologi.
	Meningkatnya kemantapan jalan	1. Pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.	1. Rehabilitasi jalan berbasis prioritas lalu lintas.
		2. Peningkatan kualitas material dengan teknologi modern.	2. Pelebaran ruas jalan dengan memperhatikan dampak lingkungan.
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan konstruksi berkelanjutan.	1. Penyelenggaraan pelatihan teknis secara reguler.
		2. Penguatan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan daerah.	2. Insentif bagi tenaga konstruksi bersertifikat.
	Mempertahankan kesesuaian infrastruktur dengan tata ruang	1. Percepatan pengesahan rencana tata ruang strategis.	1. Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perencanaan.
		2. Integrasi perencanaan infrastruktur dengan tata ruang berbasis spasial.	2. Pemantauan tata ruang melalui teknologi berbasis data spasial.
	Optimalisasi kualitas pelayanan	1. Mendorong inovasi pelayanan	1. Pengembangan aplikasi digital untuk

	melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	publik berbasis teknologi.	pelayanan publik terpadu.
		2. Pengembangan program pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	2. Implementasi program pelayanan berbasis kebutuhan lokal dan inovatif.

C. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi *"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"*, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mojokerto menetapkan sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, beberapa indikator kinerja dan target telah dirumuskan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja prioritas. Berikut adalah penjelasan untuk setiap sasaran strategis:

1. **Pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum, dan bangunan gedung**

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, sasaran ini bertujuan untuk memperluas serta pemeratakan pembangunan infrastruktur dengan fokus pada kondisi infrastruktur yang baik. Target pencapaian adalah **81% infrastruktur dalam kondisi baik**, termasuk jalan, jembatan, sanitasi, dan bangunan gedung strategis.

2. **Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air**

Sasaran ini menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air melalui optimalisasi jaringan irigasi. Indikator kinerja berupa **rasio luas daerah irigasi yang dilayani mencapai 100%**, dengan prioritas pada efisiensi pengelolaan dan keberlanjutan irigasi bagi kebutuhan pertanian.

3. **Meningkatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, target yang ditetapkan adalah **95,50% rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum** melalui SPAM jaringan perpipaan atau non-pipa yang terlindungi. Program ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi.

4. **Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah**

Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terus diperluas. Targetnya adalah **10% desa di wilayah kabupaten memiliki TPS/TPST/TPS3R** untuk mendukung pengurangan dan daur ulang sampah.

5. **Meningkatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik**

Sasaran ini berfokus pada peningkatan layanan pengolahan air limbah domestik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Target pencapaian adalah **100% rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**.

6. **Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**

Untuk mengurangi risiko banjir dan genangan, target yang ditetapkan adalah **20% perkotaan dan lingkungan memiliki sistem drainase terpadu**, melalui optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase.

7. **Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung**

Penataan bangunan gedung diarahkan pada kepatuhan terhadap standar perizinan dan sertifikasi laik fungsi (SLF). Indikator kinerja berupa **20% rasio kepatuhan PBG dan SLF** mencerminkan penguatan regulasi dan pengawasan teknis terhadap bangunan gedung.

8. **Meningkatnya kemantapan jalan**

Kemantapan jalan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung mobilitas dan perekonomian wilayah. Target yang ditetapkan adalah **93% tingkat kemantapan jalan kabupaten**, dengan fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi jalan prioritas.

9. **Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi**

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga konstruksi menjadi prioritas. Targetnya adalah **38% tenaga operator, teknisi, atau analis memiliki sertifikat kompetensi**, melalui fasilitasi sertifikasi dan pelatihan teknis berkelanjutan.

10. Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang

Dalam rangka memastikan kesesuaian antara pembangunan infrastruktur dan tata ruang, sasaran ini menetapkan target **100% kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang**, melalui penguatan sistem perencanaan berbasis spasial dan pengawasan pelaksanaan proyek.

Perencanaan kinerja ini mencerminkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

D. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga menyangkut outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut kami sajikan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan target sesuai dengan hasil Fasilitasi Perjanjian Kinerja 2024 dengan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto di Ruang rapat Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekeretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%

3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.920.757.560,00	P APBD 2024
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 19.500.054.906,00	P APBD, DAK 2024
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.9.666.312.510,00	P APBD 2024

4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.455.000.000,00	P APBD, DAK 2024
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.144.390.553,00	P APBD 2024
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 11.646.524.675,00	P APBD 2024
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 11.239.546.646,00	P APBD 2024
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 335.000.000,00	P APBD 2024
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 319.290.997.127,00	P APBD 2024
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 866.500.000,00	P APBD 2024
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.451.785.500,00	P APBD 2024

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Mojopahit tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Setiap capaian kinerja yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk memastikan tercapainya sasaran strategis yang telah direncanakan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Mojopahit tahun 2024 dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan:

- 1. Target dan realisasi kinerja tahun 2024.
- 2. Realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022).
- 3. Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021–2026.
- 4. Realisasi kinerja tahun 2024 dengan provinsi

Cara Menghitung Capaian Indikator Kinerja Penghitungan capaian indikator kinerja menggunakan rumus berikut :

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka:

Persentase Tingkat Capaian = (Realisasi ÷ Rencana) × 100%

2. **Rumus 2**

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka:

Persentase Tingkat Capaian = {(Rencana - (Realisasi - Rencana)) ÷ Rencana} × 100%

Penetapan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan petunjuk pelaksanaannya, penilaian pencapaian kinerja ditetapkan menggunakan skala pengukuran ordinal dengan standar tertentu.

Skala ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja dan menyusun rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Nilai	Kategori
91% s.d.≤ 100%	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	Sedang
51% s.d.≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

1. **Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024**

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81,00%	80,57%	99,47%	Sangat tinggi	Laporan Bidang PBG, PLPP, BM dan SDA
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Sumber Daya Air (SDA)
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	95,48%	99,98%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	9,54%	95,40%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)

5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,68%	99,68%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20,00%	20,05%	100,25%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20,00%	47,77%	238,85%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penataan Bangunan Gedung (PBG)
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93,00%	66,66%	71,68%	Sedang	Laporan Bidang Bina Marga (BM)
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00%	51,06%	134,37%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Bina Konstruksi (BIKON)
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat tinggi	Laporan Bidang Penataan Ruang (PR)

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82,15	100,18%	Sangat tinggi	Sekretariat
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	88,25	103,82%	Sangat tinggi	Sekretariat
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)	83,05	94,11%	Sangat tinggi	Sekretariat
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 inovasi	100,00%	Sangat tinggi	Sekretariat

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pemerataan dan Perluasan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi Air Minum, dan Bangunan Gedung**

- **Indikator Kinerja:** Persentase Infrastruktur Kondisi Baik
- **Target:** 81,00%
- **Realisasi:** 80,57%
- **Tingkat Capaian:** 99,47%
- **Permasalahan:** Realisasi sedikit di bawah target, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas infrastruktur, seperti perawatan jalan, jembatan, dan sanitasi.
- **Tindak Lanjut:**
 - Memperkuat anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.
 - Mengoptimalkan pengawasan proyek infrastruktur agar kualitas hasil lebih terjamin.
 - Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pendanaan.

2. **Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

- **Indikator Kinerja:** Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
- **Target & Realisasi:** 100,00%
- **Tingkat Capaian:** 100,00%
- **Permasalahan:** Tidak ada permasalahan signifikan. Namun, tantangan jangka panjang terkait keberlanjutan pengelolaan jaringan irigasi, seperti sedimentasi dan kerusakan jaringan, harus diantisipasi.
- **Tindak Lanjut :**
 - Menyusun rencana pemeliharaan jangka panjang untuk jaringan irigasi.

- Memperkuat pelibatan masyarakat setempat dalam perawatan jaringan irigasi.

3. **Meningkatnya Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi**

- **Indikator Kinerja:** Persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum
- **Target:** 95,50%
- **Realisasi:** 95,48%
- **Tingkat Capaian:** 99,98%
- **Permasalahan:** Akses air minum belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah terpencil.
- **Tindak Lanjut:**
 - Memperluas jaringan perpipaan air minum ke wilayah terpencil.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan SPAM untuk memastikan akses air minum yang berkelanjutan.

4. **Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah**

- **Indikator Kinerja:** Persentase desa dengan TPS/TPST/TPS3R
- **Target:** 10,00%
- **Realisasi:** 9,54%
- **Tingkat Capaian:** 95,40%
- **Permasalahan:** Ketersediaan TPS/TPST/TPS3R masih terbatas, terutama di desa-desa terpencil.
- **Tindak Lanjut:**
 - Mempercepat pembangunan TPS/TPST/TPS3R di wilayah prioritas.
 - Meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam investasi fasilitas pengelolaan sampah.

5. Meningkatnya Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- **Indikator Kinerja:** Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah
- **Target:** 100,00%
- **Realisasi:** 99,68%
- **Tingkat Capaian:** 99,68%
- **Permasalahan:** Sebagian kecil rumah tangga masih belum memiliki akses layanan pengolahan air limbah.
- **Tindak Lanjut:**
 - Memperluas cakupan layanan pengolahan air limbah ke wilayah yang belum terjangkau.
 - Memperkuat pengelolaan air limbah dengan inovasi teknologi ramah lingkungan.

6. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- **Indikator Kinerja:** Persentase perkotaan yang dilengkapi sistem drainase
- **Target:** 20,00%
- **Realisasi:** 20,05%
- **Tingkat Capaian:** 100,25%
- **Permasalahan:** Sistem drainase perlu terus diperbarui untuk mengantisipasi risiko banjir akibat curah hujan tinggi.
- **Tindak Lanjut:**
 - Mengembangkan master plan drainase yang mencakup prediksi perubahan iklim.
 - Melibatkan komunitas lokal dalam menjaga kebersihan saluran drainase.

7. Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung

- **Indikator Kinerja:** Rasio kepatuhan PBG dan SLF
- **Target:** 20,00%
- **Realisasi:** 47,77%
- **Tingkat Capaian:** 238,85%

- **Permasalahan:** Target awal terlalu rendah, menunjukkan kurangnya ambisi awal dalam perencanaan kinerja.
- **Tindak Lanjut:**
 - Menyusun target yang lebih realistis untuk periode berikutnya.
 - Mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi PBG dan SLF.

8. Meningkatnya Kemantapan Jalan

- **Indikator Kinerja:** Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten
- **Target:** 93,00%
- **Realisasi:** 66,66%
- **Tingkat Capaian:** 71,68%
- **Permasalahan:** Realisasi jauh di bawah target, menunjukkan adanya masalah dalam pemeliharaan jalan, seperti kerusakan jalan yang belum tertangani.
- **Tindak Lanjut:**
 - Mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan jalan yang rusak.
 - Mengidentifikasi prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan lokasi strategis.
 - Memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas material jalan.

9. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- **Indikator Kinerja:** Rasio tenaga bersertifikat kompetensi
- **Target:** 38,00%
- **Realisasi:** 51,06%
- **Tingkat Capaian:** 134,37%
- **Permasalahan:** Meski melampaui target, distribusi tenaga bersertifikat kompetensi mungkin belum merata di semua bidang konstruksi.
- **Tindak Lanjut:**
 - Mengembangkan pelatihan lanjutan untuk tenaga konstruksi di wilayah yang masih kekurangan.

- Memperluas cakupan sertifikasi untuk semua sektor konstruksi.
- 10. **Mempertahankan Kesesuaian Pembangunan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang**
 - **Indikator Kinerja:** Persentase kesesuaian pembangunan
 - **Target & Realisasi:** 100,00%
 - **Tingkat Capaian:** 100,00%
 - **Permasalahan:** Tidak ada permasalahan signifikan, namun perlu konsistensi dalam memantau setiap pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
 - **Tindak Lanjut:**
 - Meningkatkan koordinasi antar sektor untuk memastikan implementasi tata ruang yang berkelanjutan.
 - Mengintegrasikan teknologi GIS untuk memantau kesesuaian pembangunan secara real-time.

Analisis Tabel Kinerja Lainnya

11. **Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel**
 - **Indikator Kinerja:**
 1. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**
 - **Target:** 82 (A)
 - **Realisasi:** 82,15
 - **Tingkat Capaian:** 100,18% (Sangat Tinggi)
 - **Permasalahan:** Tidak ada permasalahan signifikan, namun ada peluang untuk meningkatkan nilai lebih jauh guna menjaga konsistensi dan mencegah stagnasi.
 - **Tindak Lanjut:**
 - Meningkatkan akurasi perencanaan dan monitoring program agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP.
 - Melibatkan unit kerja dalam evaluasi mandiri untuk meninjau pencapaian indikator secara komprehensif.

2. **Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**

- **Target:** 85%
- **Realisasi:** 88,25%
- **Tingkat Capaian:** 103,82% (Sangat Tinggi)
- **Permasalahan:** Pencapaian melampaui target, namun perlu evaluasi apakah alokasi anggaran sudah sepenuhnya efektif dan efisien.
- **Tindak Lanjut:**
 - Melakukan evaluasi mendalam terkait penyerapannya, memastikan setiap penggunaan anggaran memberi dampak maksimal terhadap capaian program.
 - Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk optimalisasi belanja.

3. **Indeks Profesionalitas ASN**

- **Target:** 88,25 (Tinggi)
- **Realisasi:** 83,05
- **Tingkat Capaian:** 94,11% (Sangat Tinggi)
- **Permasalahan:** Belum mencapai target yang ditetapkan, mengindikasikan adanya kebutuhan pengembangan kapasitas ASN.
- **Tindak Lanjut:**
 - Menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan.
 - Meningkatkan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong ASN lebih profesional.

12. **Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah**

• **Indikator Kinerja:**

1. **Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan**

- **Target:** 2 Inovasi

- **Realisasi:** 2 Inovasi
- **Tingkat Capaian:** 100% (Sangat Tinggi)
- **Permasalahan:** Tidak ada permasalahan signifikan, tetapi inovasi yang dicapai masih terbatas pada target minimum.
- **Tindak Lanjut:**
 - Mendorong pengembangan inovasi tambahan untuk memperluas dampak layanan.
 - Melakukan evaluasi keberlanjutan dari inovasi yang sudah ada, memastikan relevansi dan dampak jangka panjang.
 - Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi untuk menghasilkan solusi berbasis kebutuhan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Perbandingan realisasi kinerja dapat kami simpulkan bahwa :

- **Peningkatan Kinerja Signifikan:** Penataan Bangunan Gedung, Jasa Konstruksi, dan Sistem Drainase.
- **Penurunan Kinerja:** Kemantapan Jalan, Infrastruktur Kondisi Baik, dan Indeks Profesionalitas ASN.
- **Stabil:** Pengelolaan Sumber Daya Air, Kesesuaian Tata Ruang, dan Inovasi.
- **Fokus Perbaikan:** Infrastruktur kondisi baik dan kemantapan jalan perlu perhatian lebih karena capaian menurun cukup signifikan.

Analisis perbandingan kami sajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISAS I 2022	2023		Tingkat Capaian	2024		Tingkat Capaian	Analisis
			TARGE T	REALISAS I		TARGE T	REALISAS I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	74,99%	75,00%	80,00%	106,67 %	81,00%	80,57%	99,47%	Capaian turun dari 106,67% ke 99,47%; realisasi sedikit meningkat.
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	Tidak ada perubahan; capaian tetap penuh.
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	88,95%	89,00%	94,19%	105,83 %	95,50%	95,48%	99,98%	Capaian menurun dari 105,83% ke 99,98%, meskipun realisasi naik.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	6,58%	21,29%	8,88%	41,71%	10,00%	9,54%	95,40%	Capaian meningkat signifikan dari 41,71% ke 95,40% karena target lebih realistis pada 2024.
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,80%	94,85%	99,50%	104,90 %	100,00 %	99,68%	99,68%	Capaian turun dari 104,90% ke 99,68%; realisasi hampir stabil.
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	11,39%	19,00%	18,56%	97,68%	20,00%	20,05%	100,25 %	Capaian meningkat dari 97,68% ke 100,25%; target dan realisasi lebih tinggi pada 2024.
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	10,00%	11,00%	18,81%	171,00 %	20,00%	47,77%	238,85 %	Kinerja meningkat signifikan baik dari segi

									realisasi maupun capaian.
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	88,24%	88,30%	89,74%	101,63 %	93,00%	66,66%	71,68%	Penurunan drastis dalam realisasi dan capaian.
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18,73%	24,81%	30,81%	124,18 %	38,00%	51,06%	134,37 %	Peningkatan signifikan dalam capaian dan realisasi.
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	Tidak ada perubahan; capaian konsisten penuh.
KINERJA LAINNYA									
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	100%	82 (A)	82,15	100,18 %	Peningkatan capaian tipis dari 100% ke 100,18%.

	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	84,65%	84,75%	84,61%	99,83%	85%	88,25	103,82 %	Peningkatan capaian dari 99,83% ke 103,82%; realisasi naik.
	Indeks profesionalitas ASN	42	80	88,22	110,28 %	88,25 (Tinggi)	83,05	94,11%	Penurunan capaian dari 110,28% ke 94,11%; realisasi turun.
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	100,00 %	2 Inovasi	2 inovasi	100,00 %	Stabil; capaian penuh di kedua tahun, dengan peningkatan jumlah inovasi dari 1 menjadi 2.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2021 -2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Perbandingan realisasi kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan target RENSTRA tahun 2024 digambarkan dengan capaian sasaran indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	74,38%	80,57%	Melebihi target sebesar 6,19%

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa :

- 1. **Kinerja Utama:** Pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum, dan bangunan gedung.
- 2. **Indikator Kinerja:** Persentase infrastruktur kondisi baik.
- 3. **Target Akhir Renstra:** 74,38%.
- 4. **Realisasi 2024:** 80,57%.
- 5. **Tingkat Kemajuan:** Melebihi target akhir Renstra sebesar 6,19%.

Permasalahan :

- 1. **Ketidaksesuaian antara target dan kebutuhan lapangan:**
 - o Target Renstra mungkin terlalu rendah dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur di lapangan.

- Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan persepsi bahwa capaian melebihi ekspektasi, sementara kebutuhan sebenarnya masih belum sepenuhnya terpenuhi.
- 2. **Kualitas pelaksanaan proyek:**
 - Meskipun capaian infrastruktur dalam kondisi baik meningkat, ada kemungkinan bahwa beberapa infrastruktur yang dilaporkan "baik" tidak memiliki standar kualitas yang konsisten atau sesuai spesifikasi teknis.
- 3. **Ketidakmerataan pemerataan infrastruktur:**
 - Capaian agregat mungkin tinggi, tetapi distribusi infrastruktur dalam kondisi baik belum merata di seluruh wilayah kabupaten.
- 4. **Keterbatasan data atau metode evaluasi:**
 - Pengumpulan data atau indikator capaian mungkin belum sepenuhnya akurat, yang berpotensi memberikan hasil capaian yang kurang representatif terhadap kondisi sebenarnya.

Tindak Lanjut untuk Mengatasi Permasalahan

- 1. **Evaluasi dan Penyesuaian Target Renstra:**
 - Melakukan kajian ulang terhadap target-target Renstra berdasarkan perkembangan kebutuhan dan potensi wilayah untuk memastikan target lebih relevan dan aspiratif.
 - Meningkatkan kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk menyusun target yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- 2. **Peningkatan Pengawasan Kualitas Infrastruktur:**
 - Mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi mutu proyek, memastikan bahwa semua infrastruktur yang dilaporkan dalam kondisi baik sesuai standar teknis dan tahan lama.
 - Menggunakan audit eksternal untuk memvalidasi laporan capaian.
- 3. **Pemetaan Ketidakmerataan Capaian:**
 - Melakukan analisis spasial untuk memetakan wilayah mana yang masih kekurangan infrastruktur dalam kondisi baik.
 - Menyusun strategi prioritas untuk mengarahkan sumber daya ke wilayah yang paling membutuhkan.

4. **Peningkatan Akurasi Data dan Sistem Pemantauan:**
 - Memperkuat mekanisme pengumpulan data berbasis teknologi, seperti GIS atau aplikasi berbasis web, untuk memantau kondisi infrastruktur secara real-time.
 - Melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan kondisi infrastruktur melalui mekanisme partisipatif.
5. **Rencana Peningkatan Infrastruktur Jangka Panjang:**
 - Menyusun program perencanaan infrastruktur berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada capaian jangka pendek tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.
 - Meningkatkan sinergi dengan perencanaan tata ruang untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi.

4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Provinsi Jatim**
TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN
DPRCKP PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALI SASI 2023	REALI SASI 2023 PROVINSI	2024		Perband ingan Tahun 2023 dan 2024
				TAR GET	REALI SASI	
1	2	3	4	6	7	8
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	80,00 %		81,00 %	80,57 %	
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang	100,00 %		100,0 0%	100,00 %	

	dilayani oleh jaringan irigasi					
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	94,19 %	96,01 %	95,50 %	95,48 %	Capaian lebih kecil Sebesar - 0,52%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3 R	8,88%	6,22%	10,00 %	9,54%	Capaian lebih besar Sebesar 3,32%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,50 %	83,72 %	100,00 %	99,68 %	Capaian lebih besar Sebesar 15,96%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	18,56 %	8,33%	20,00 %	20,05 %	Capaian lebih besar Sebesar 11,72%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	18,81 %		20,00 %	47,77 %	
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	89,74 %	89,25 %	93,00 %	66,66 %	Capaian lebih besar Sebesar - 22,59%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,81 %		38,00 %	51,06 %	

Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	105,15 %	100,00 %	100,00 %	Capaian lebih kecil Sebesar - 5,15%
KINERJA LAINNYA						
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	85,2	82 (A)	82,15	Capaian lebih kecil sebesar - 3,05%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	84,61 %	86,13 %	85%	88,25	Capaian lebih besar Sebesar 2,12%
	Indeks profesionalitas ASN	88,22		88,25 (Tinggi)	83,05	
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		2 Inovasi	2 inovasi	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data yang telah disampaikan, berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi:

1. Keberhasilan Kinerja

- **Sasaran:** Pemerataan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya air.

Indikator:

- Persentase Infrastruktur Kondisi Baik (106,67% capaian di 2023, meskipun turun ke 99,47% di 2024).
- Pengelolaan SDA dengan rasio daerah irigasi (100% stabil).
- Kepatuhan PBG dan SLF (171% capaian di 2023, meningkat menjadi 238,85% di 2024).

Penyebab Keberhasilan:

- Koordinasi yang Baik:**
 - Kolaborasi antara pemangku kepentingan seperti Dinas PU, masyarakat, dan kontraktor pelaksana.
- Pemanfaatan Anggaran yang Optimal:**
 - Efisiensi dalam realisasi anggaran (103,82% capaian realisasi anggaran perangkat daerah di 2024).
- Komitmen terhadap Inovasi:**
 - Peningkatan jumlah inovasi yang terinternalisasi menunjukkan adanya fokus pada perbaikan sistem.

2. Kegagalan atau Penurunan Kinerja

- **Sasaran:**
 - Kemantapan jalan kabupaten (penurunan dari 101,63% capaian di 2023 menjadi 71,68% di 2024).
 - Indeks Profesionalitas ASN (penurunan dari 110,28% di 2023 menjadi 94,11% di 2024).

Penyebab Kegagalan/Penurunan:

- Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran:**
 - Fokus anggaran yang terpecah ke prioritas lain dapat mengurangi investasi untuk kemantapan jalan.
- Kendala Teknis dalam Pelaksanaan:**
 - Keterlambatan pelaksanaan proyek di lapangan, seperti pembangunan jalan, bisa memengaruhi realisasi.
- Target yang Ambisius:**
 - Penetapan target yang tinggi untuk beberapa indikator melebihi kemampuan dan kapasitas daerah.

4. **Kurangnya Konsistensi Pelatihan:**
- o Penurunan indeks profesionalitas ASN dapat terjadi karena kurangnya pembinaan atau pelatihan yang berkesinambungan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. **Peningkatan Koordinasi dan Efisiensi Proyek:**
- o Pemantauan langsung terhadap pelaksanaan proyek untuk menghindari keterlambatan (contoh: sistem drainase yang meningkat ke 100,25% capaian pada 2024).
2. **Penyesuaian Target dan Perencanaan:**
- o Fokus pada prioritas yang realistis, seperti target desa dengan TPS/TPST/TPS3R yang tercapai lebih baik pada 2024 (95,40%).
3. **Optimalisasi Penggunaan Aplikasi dan Teknologi:**
- o Input data perencanaan menggunakan aplikasi SIPD-RI dan e-SPM untuk meningkatkan akurasi data dan evaluasi kinerja.
4. **Fokus pada Inovasi dan Tata Kelola Birokrasi:**
- o Penambahan jumlah inovasi yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan layanan publik.
5. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:**
- o Pelatihan dan sertifikasi tenaga teknis untuk meningkatkan kompetensi (rasio tenaga bersertifikat meningkat menjadi 134,37% di 2024).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja sebesar Rp. 422.419.398.477 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 84.804.979.678; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 337.614.418.799

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	422.419.398.477	372.793.243.693	88,25%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.500.054.906	16.780.713.407	86,05%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	721.121.000	680.066.704	94,31%
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	146.092.259	97,39%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	451.121.000	416.455.968	92,32%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	120.000.000	117.518.477	97,93%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.778.933.906	16.100.646.703	85,74%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.827.648.575	1.515.298.106	82,91%
Peningkatan Bendung Irigasi	938.588.313	766.089.312	81,62%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.857.688.409	3.255.210.730	84,38%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	7.506.208.609	6.086.297.745	81,08%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.648.800.000	4.477.750.810	96,32%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.666.312.510	8.964.904.759	92,74%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.666.312.510	8.964.904.759	92,74%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	550.000.000	540.404.900	98,26%
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.254.294.190	1.155.528.867	92,13%

Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.862.018.320	7.268.970.992	92,46%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.455.000.000	1.445.294.692	99,33%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.455.000.000	1.445.294.692	99,33%
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.455.000.000	1.445.294.692	99,33%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.144.390.553	7.099.783.835	99,38%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.144.390.553	7.099.783.835	99,38%
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.144.390.553	7.099.783.835	99,38%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.646.524.675	10.678.177.221	91,69%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.646.524.675	10.678.177.221	91,69%
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	5.408.859.000	5.025.002.094	92,90%
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	5.797.665.675	5.328.615.299	91,91%
Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	440.000.000	324.559.828	73,76%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.239.546.646	8.338.088.241	74,19%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.239.546.646	8.338.088.241	74,19%
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	50.000.000	46.806.650	93,61%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10.689.546.646	7.800.843.451	72,98%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000	97.087.100	97,09%

Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	400.000.000	393.351.040	98,34%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	335.000.000	293.136.805	87,50%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	335.000.000	293.136.805	87,50%
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150.000.000	137.618.130	91,75%
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	185.000.000	155.518.675	84,06%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	334.193.526.127	293.373.258.928	87,79%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	334.193.526.127	293.373.258.928	87,79%
Pengelolaan Leger Jalan	135.000.000	132.953.096	98,48%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	930.000.000	889.484.400	95,64%
Rekonstruksi Jalan	53.859.023.075	49.589.349.031	92,07%
Pemeliharaan Berkala Jalan	37.640.527.895	34.493.777.048	91,64%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	171.080.006.204	158.155.776.885	92,45%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.095.335.472	1.760.480.718	84,02%
Pembangunan Jembatan	36.438.847.877	19.566.812.904	53,70%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100.000.000	92.194.500	92,19%
Rehabilitasi Jalan	8.646.340.000	7.947.293.130	91,92%
Pemeliharaan Rutin Jalan	22.361.670.604	19.938.239.120	89,16%
Pelebaran Jembatan	906.775.000	806.898.096	88,99%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	866.500.000	843.293.650	97,32%

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	400.000.000	391.842.900	97,96%
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	400.000.000	391.842.900	97,96%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	96.913.500	96,91%
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000	96.913.500	96,91%
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	366.500.000	354.537.250	96,74%
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	100.000.000	93.706.950	93,71%
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	266.500.000	260.830.300	97,87%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.451.785.500	1.425.363.629	98,18%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	951.785.500	942.782.187	99,05%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	951.785.500	942.782.187	99,05%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.321.879	99,55%
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	150.000.000	149.321.879	99,55%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	333.259.563	95,22%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350.000.000	333.259.563	95,22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.920.757.560	23.551.228.526	94,50%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.000.000	371.152.786	97,67%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.700.000	98,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000	341.852.786	97,67%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.600.000	97,33%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.270.295.000	19.977.812.880	93,92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.270.295.000	19.977.812.880	93,92%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	39.715.100	99,29%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.000.000	39.715.100	99,29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.400.000	620.105.082	93,76%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.900.000	33.908.324	91,89%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	98.609.000	98,61%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.500.000	90.232.350	95,48%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000	76.127.000	95,16%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	33.842.270	67,68%
Penyediaan Bahan/Material	150.000.000	141.821.650	94,55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	145.564.488	97,04%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.774.562.560	1.756.373.425	98,98%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.000.000	266.634.065	95,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.494.562.560	1.489.739.360	99,68%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.500.000	786.069.253	98,94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.500.000	295.509.985	98,67%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	300.000.000	298.660.955	99,55%
Pemeliharaan Mebel	-	-	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	43.956.500	97,68%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	74.314.543	99,09%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	73.627.270	98,17%

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 88,25 % dengan realisasi sebesar Rp. 372.793.243.693. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tahun 2024 termasuk kategori **Tinggi**

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Bappeda sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	%
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	422.419.398.477	100,00 %
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	19.500.054.906	4,62%
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	9.666.312.510	2,29%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	1.455.000.000	0,34%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	7.144.390.553	1,69%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	11.646.524.675	2,76%

Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	11.574.546.646	2,74%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	334.193.526.127	79,11%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	866.500.000	0,21%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	1.451.785.500	0,34%
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	24.920.757.560	5,90%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		
	Indeks profesionalitas ASN		
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81,00%	80,57%	99,47%	422.419.398.477	372.793.243.693	88,25%
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	19.500.054.906	16.780.713.407	86,05%
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	95,48%	99,98%	9.666.312.510	8.964.904.759	92,74%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	9,54%	95,40%	1.455.000.000	1.445.294.692	99,33%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,68%	99,68%	7.144.390.553	7.099.783.835	99,38%

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20,00%	20,05%	100,25%	11.646.524.675	10.678.177.221	91,69%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20,00%	47,77%	238,85%	11.574.546.646	8.631.225.046	74,57%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93,00%	66,66%	71,68%	334.193.526.127	293.373.258.928	87,79%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00%	51,06%	134,37%	866.500.000	843.293.650	97,32%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	100,00%	100,00%	1.451.785.500	1.425.363.629	98,18%
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82,15	100,18%	24.920.757.560	23.551.228.526	94,50%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	85%	88,25	103,82%			
	Indeks profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)	83,05	94,11%			
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 inovasi	100,00%			

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja	Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
		% Capaian	% Capaian		
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	99,47%	88,25 %	11,22%	Efisien
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	86,05 %	13,95%	Efisien
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	99,98%	92,74 %	7,24%	Efisien
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	95,40%	99,33 %	-3,93%	Tidak efisien
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,68%	99,38 %	0,30%	Efisien
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	100,25%	91,69 %	8,56%	Efisien

Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	238,85%	74,57 %	164,28%	Efisien	
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	71,68%	87,79 %	-16,11%	Tidak efisien	
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	134,37%	97,32 %	37,05%	Efisien	
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	98,18 %	1,82%	Efisien	
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,18%	99,53%	94,50 %	5,02%	Efisien
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	103,82%				
	Indeks profesionalitas ASN	94,11%				
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100,00%				

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

Ringkasan Umum

- Total anggaran untuk **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**: Rp422.419.398.477.
- Realisasi anggaran: Rp372.793.243.693 atau **88,25%** dari total anggaran.
- Sebagian besar program mencapai lebih dari **85% capaian anggaran**, namun terdapat beberapa program yang realisasi anggarannya lebih rendah, seperti **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan capaian hanya **74,19%**.

Analisis Berdasarkan Program

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):**
 - **Anggaran:** Rp19.500.054.906.
 - **Realisasi:** Rp16.780.713.407 (**86,05%**).
 - **Analisis:**

Kinerja cukup baik namun masih di bawah rata-rata capaian keseluruhan. Hal ini mungkin terkait dengan keterbatasan waktu pelaksanaan atau kendala teknis dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:**
 - **Anggaran:** Rp9.666.312.510.
 - **Realisasi:** Rp8.964.904.759 (**92,74%**).
 - **Analisis:**

Program ini berhasil mendekati target anggaran dengan capaian kinerja yang tinggi. Peningkatan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan telah mencapai **99,98%** dari target indikator.
- 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional:**

- **Anggaran:** Rp1.455.000.000.
 - **Realisasi:** Rp1.445.294.692 (**99,33%**).
 - **Analisis:**
Capaian anggaran yang hampir sempurna menunjukkan bahwa pengelolaan TPS/TPST/TPS3R berjalan sangat baik. Namun, capaian indikator masih **95,40%**, sehingga perlu evaluasi efisiensi program untuk mendekati target.
4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah:**
- **Anggaran:** Rp7.144.390.553.
 - **Realisasi:** Rp7.099.783.835 (**99,38%**).
 - **Analisis:**
Program ini sangat efektif, sejalan dengan capaian indikator layanan air limbah domestik yang mencapai **99,68%**.
5. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase:**
- **Anggaran:** Rp11.646.524.675.
 - **Realisasi:** Rp10.678.177.221 (**91,69%**).
 - **Analisis:**
Realisasi anggaran cukup tinggi, sesuai dengan capaian indikator **100,25%**. Hal ini mencerminkan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program.
6. **Program Penataan Bangunan Gedung:**
- **Anggaran:** Rp11.239.546.646.
 - **Realisasi:** Rp8.338.088.241 (**74,19%**).
 - **Analisis:**
Capaian rendah menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan administrasi atau hambatan teknis di lapangan yaitu tidak terlaksananya Hibah Pembangunan Polsek Dlanggu. Namun, capaian indikator "Rasio Kepatuhan PBG dan SLF" menunjukkan peningkatan signifikan (**238,85%**).
7. **Program Penyelenggaraan Jalan:**
- **Anggaran:** Rp334.193.526.127.
 - **Realisasi:** Rp293.373.258.928 (**87,79%**).
 - **Analisis:**
Realisasi anggaran cukup tinggi, tetapi capaian indikator "Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten" menurun drastis menjadi **71,68%**.

Hal ini dikarenakan pemberlakuan data status ruas jalan terbaru, panjang jalan sebelumnya 1.041,324 km menjadi 1.166,389 km yang mengakibatkan penurunan pada tingkat capaian.

8. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi:**

- o **Anggaran:** Rp866.500.000.
- o **Realisasi:** Rp843.293.650 (**97,32%**).
- o **Analisis:**
Realisasi anggaran mendekati 100%, sejalan dengan capaian indikator sertifikasi tenaga ahli yang meningkat menjadi **134,37%**.

Penyebab Keberhasilan atau Kendala

1. **Keberhasilan:**

- o Perencanaan dan koordinasi yang baik, terutama pada program dengan capaian anggaran di atas 90%.
- o Penggunaan aplikasi SIPD-RI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi perencanaan.

2. **Kendala:**

- o **Administrasi:** Keterlambatan dalam proses pelelangan atau pencairan anggaran.
- o **Teknis:** Cuaca atau kondisi lapangan yang memengaruhi pelaksanaan proyek jalan dan bangunan.
- o **Pengawasan:** Kurangnya evaluasi kualitas hasil pekerjaan.

Alternatif Solusi

1. **Optimalisasi Proses Administrasi:**

- o Mempercepat proses pelelangan dan administrasi proyek untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan.

2. **Peningkatan Pengawasan:**

- o Memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek, terutama pada program jalan dan bangunan, untuk memastikan kualitas sesuai standar.

3. **Peninjauan Target dan Anggaran:**

- o Menyesuaikan target capaian dengan realisasi anggaran agar lebih realistis dan fokus pada prioritas utama.

4. Peningkatan Kapasitas SDM:

- Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tim teknis untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi.

5. Evaluasi Program Berbasis Kinerja:

- Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program yang berjalan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat.

C. Data Prestasi yang diperoleh pada tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tidak memiliki capaian prestasi, capaian prestasi terakhir pada tahun 2018 adalah Juara Harapan I Lomba Petugas O & P Irigasi Teladan Tahun 2018 Tingkat Juru Pengairan Provinsi Jawa Timur.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data capaian kinerja, realisasi anggaran, dan indikator program/kegiatan tahun 2024, dapat disimpulkan:

1. **Capaian Anggaran:**
 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan memiliki capaian anggaran **88,25%**, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, terdapat program dengan capaian rendah seperti **Program Penataan Bangunan Gedung** (74,19%), dikarenakan tidak terlaksananya Hibah Pembangunan Polsek Dlanggu.
2. **Capaian Indikator Kinerja:**
 - Sebagian besar indikator kinerja strategis menunjukkan hasil positif, bahkan beberapa di antaranya melebihi target, seperti **Rasio Kepatuhan PBG dan SLF** (238,85%).
 - Namun, terdapat indikator yang mengalami penurunan signifikan, seperti **Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten** (71,68%), yang tidak sejalan dengan realisasi anggaran tinggi (87,79%) dikarenakan pemberlakuan data status ruas jalan terbaru, panjang jalan sebelumnya 1.041,324 km menjadi 1.166,389 km yang mengakibatkan penurunan pada tingkat capaian.
3. **Keberhasilan dan Kendala:**
 - Keberhasilan diraih berkat perencanaan yang baik, pemanfaatan teknologi (seperti aplikasi SIPD-RI), dan pengelolaan sumber daya yang optimal pada program tertentu.
 - Kendala utama meliputi keterlambatan administrasi, hambatan teknis di lapangan, kurangnya pengawasan, dan penyesuaian target yang belum optimal terhadap sumber daya.

B. Langkah Perbaikan

1. **Perbaikan Administrasi dan Perencanaan:**
 - Mempercepat proses pelelangan dan administrasi anggaran untuk menghindari penundaan pelaksanaan.
 - Menggunakan aplikasi SIPD-RI secara lebih optimal untuk perencanaan dan pengelolaan data secara terintegrasi.
2. **Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi:**
 - Memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan proyek, terutama untuk program dengan realisasi tinggi tetapi capaian indikator rendah.

- Melakukan evaluasi berbasis hasil untuk memastikan bahwa kualitas proyek sesuai dengan standar teknis dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- 3. **Fokus pada Program Prioritas:**
 - Menyusun skala prioritas pada program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pengelolaan air minum, air limbah, dan drainase, yang memiliki capaian indikator tinggi.
- 4. **Peningkatan Kapasitas SDM:**
 - Melanjutkan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga teknis (operator, analis, dan teknisi) untuk meningkatkan kompetensi, seperti yang tercermin dari keberhasilan capaian **Rasio Sertifikasi Tenaga Ahli** (134,37%).
- 5. **Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah:**
 - Memastikan sinergi antara sub bagian perencanaan dan program dengan bidang teknis untuk mengurangi hambatan teknis dan administratif.
- 6. **Penyesuaian Target dan Anggaran:**
 - Meninjau kembali target capaian kinerja dan menyelaraskannya dengan anggaran serta kondisi di lapangan untuk menciptakan perencanaan yang lebih realistis.

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021-2026**
- 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- 3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024**
- 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program
							2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan	1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik			Persentase Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, Bangunan Gedung Kondisi Baik $\frac{\text{---}}{6} \times 100\%$	72,38%	72,88%	73,38%	73,88%	74,38%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					2. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah anggaran yang terrealisasi Jumlah anggaran keseluruhan x 100%	-	80%	85%	87%	90%	

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program
				2. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3. Indeks profesionalitas ASN 1 Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Nilai Indeks profesionalitas ASN Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	80	80	80	80	
				3 Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	1 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) Luas daerah irigasi kewenangan kab kota	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				4 Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	86,87%	87,52%	88,82%	89,15%	90,00%	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program
				5 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1 Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	$\frac{\text{Jumlah Desa Tersedia TPS/TPST/TPS3R}}{\text{Jumlah Desa di kabupaten}} \times 100 \%$	18%	21%	25%	28%	31%	- PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				6 Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	1 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100 \%$	87,85%	88,12%	88,89%	89,34%	89,92%	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				7 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1 Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	$\frac{\text{Panjang drainase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase}}{\text{Panjang drainase yang dibutuhkan wilayah perkotaan dan lingkungan dalam satu kabupaten}} \times 100 \%$	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				8 Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	1 Rasio kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$	10%	11%	12%	13%	14%	- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program
												- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
				9 Meningkatnya kemantapan jalan	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	81,20%	82,20%	83,20%	84,20%	85,20%	- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				10 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	19,08%	24,81%	30,53%	36,26%	41,98%	- PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				11 Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	1 Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dalam DPA}}{\text{Jumlah Indikasi Program dalam dokumen rencana tata ruang}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Sumber data
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan,irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81,00%	Laporan Bidang PBG, PLPP, BM dan SDA
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	Laporan Bidang Sumber Daya Air (SDA)
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20,00%	Laporan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman (PLPP)
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20,00%	Laporan Bidang Penataan Bangunan Gedung (PBG)
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93,00%	Laporan Bidang Bina Marga (BM)
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00%	Laporan Bidang Bina Konstruksi (BIKON)
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	Laporan Bidang Penataan Ruang (PR)

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	Sekretariat
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	Sekretariat
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)	Sekretariat
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	Sekretariat



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA
Pembina Tk. I
NIP 197910102009011011

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analis yang memiliki sertifikat kompetensi	38%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.920.757.560,00	P APBD 2024
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 19.500.054.906,00	P APBD, DAK 2024
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.9.666.312.510,00	P APBD 2024
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.455.000.000,00	P APBD, DAK 2024
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 7.144.390.553,00	P APBD 2024
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 11.646.524.675,00	P APBD 2024
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 11.239.546.646,00	P APBD 2024
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 335.000.000,00	P APBD 2024
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 319.290.997.127,00	P APBD 2024
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 866.500.000,00	P APBD 2024
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.451.785.500,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

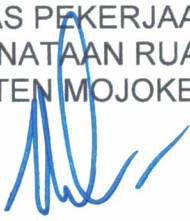
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, ST., M.BA
Pembina Tk. I
NIP 197910102009011011

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81,00%	80,57%	99,47%	422.419.398.477	372.793.243.693	88,25%
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	19.500.054.906	16.780.713.407	86,05%
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	95,48%	99,98%	9.666.312.510	8.964.904.759	92,74%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	9,54%	95,40%	1.455.000.000	1.445.294.692	99,33%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,68%	99,68%	7.144.390.553	7.099.783.835	99,38%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	20,00%	20,05%	100,25%	11.646.524.675	10.678.177.221	91,69%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	20,00%	47,77%	238,85%	11.574.546.646	8.631.225.046	74,57%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	93,00%	66,66%	71,68%	334.193.526.127	293.373.258.928	87,79%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00%	51,06%	134,37%	866.500.000	843.293.650	97,32%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00%	100,00%	100,00%	1.451.785.500	1.425.363.629	98,18%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	82,15	100,18%	24.920.757.560	23.551.228.526	94,50%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	85%	88,25	103,82%			
	Indeks profesionalitas ASN	88,25 (Tinggi)	83,05	94,11%			
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 inovasi	100,00%			

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					422.419.398.477	#####			88,25%
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik	Persen	68	68	19.500.054.906	#####			86,05%
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA terkelola	Persen	83	83	721.121.000	680.066.704	Kerusakan atau degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia atau alam	Penerapan kebijakan perlindungan dan rehabilitasi lingkungan	94,31%
		1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	150.000.000	146.092.259			97,39%
		1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	3	451.121.000	416.455.968			92,32%
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	1	120.000.000	117.518.477			97,93%
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi	Persen	75	75	18.778.933.906	#####	Keterbatasan akses air atau pengelolaan irigasi yang kurang efisien	Penyuluhan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur irigasi	85,74%
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,8	0,8	1.827.648.575	1.515.298.106			82,91%
		1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	1	1	938.588.313	766.089.312			81,62%
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	5,1	5,1	3.857.688.409	3.255.210.730			84,38%
		1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	10	10	7.506.208.609	6.086.297.745			81,08%
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	6	6	4.648.800.000	4.477.750.810			96,32%
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	Rumah Tangga	345545	329426	9.666.312.510	#####			92,74%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	Rumah Tangga	1400	1929	9.666.312.510	#####	Ketersediaan air bersih yang terbatas atau tidak merata	Pembangunan dan perawatan infrastruktur SPAM	92,74%
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	5	5	550.000.000	540.404.900			98,26%
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	50	50	1.254.294.190	1.155.528.867			92,13%
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1050	1929	7.862.018.320	7.268.970.992			92,46%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPS/TPST/TPS3R yang berkualitas	Persen	10	9,54	1.455.000.000	#####			99,33%
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	Desa	5	3	1.455.000.000	#####	Volume sampah meningkat, pengelolaan yang belum optimal	Penyuluhan masyarakat, pembangunan tempat pengelolaan sampah	99,33%
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	1	1	1.455.000.000	1.445.294.692			99,33%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Rumah	283955	283600	7.144.390.553	#####			99,38%
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah Tangga	394	542	7.144.390.553	#####	Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik	Penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik	99,38%
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	394	542	7.144.390.553	7.099.783.835			99,38%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Persen	18	20,56	11.646.524.675	#####			91,69%
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	M	3142	3531	11.646.524.675	#####	Banjir akibat drainase yang buruk	Perbaikan dan pengembangan sistem drainase	91,69%
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	1615	1615	5.408.859.000	5.025.002.094			92,90%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03.06.2.0 1.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	1	1	5.797.665.675	5.328.615.299			91,91%
		1.03.06.2.0 1.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan	2	2	440.000.000	324.559.828			73,76%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	Persen	95,5	96	11.239.546.646	#####			74,19%
		1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	Persen	96	95,5	11.239.546.646	#####	Pelanggaran terhadap regulasi pembangunan	Pengawasan ketat, penegakan hukum terhadap pelanggaran	74,19%
		1.03.08.2.0 1.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	4	4	50.000.000	46.806.650			93,61%
		1.03.08.2.0 1.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	10.689.546.646	7.800.843.451			72,98%
		1.03.08.2.0 1.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	25	25	100.000.000	97.087.100			97,09%
		1.03.08.2.0 1.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1	1	400.000.000	393.351.040			98,34%
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL	Persen	10	8	335.000.000	293.136.805			87,50%
		1.03.09.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang sesuai RTBL	Unit	387	381	335.000.000	293.136.805	Ketidakteraturan dalam pembangunan dan penataan lingkungan	Penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan pembangunan	87,50%
		1.03.09.2.0 1.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	1	150.000.000	137.618.130			91,75%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03.09.2.0 1.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	185.000.000	155.518.675			84,06%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik Persentase Jembatan Kondisi Baik	Persen	61	66,6	334.193.526.127	#####			87,79%
		1.03.10.2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	KM	635	819,11	334.193.526.127	#####	Kerusakan jalan, kemacetan, dan keselamatan yang kurang terjamin	Pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkelanjutan	87,79%
		1.03.10.2.0 1.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1	1	135.000.000	132.953.096			98,48%
		1.03.10.2.0 1.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	10	10	930.000.000	889.484.400			95,64%
		1.03.10.2.0 1.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	15,174	15,174	53.859.023.075	#####			92,07%
		1.03.10.2.0 1.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	35,893	35,893	37.640.527.895	#####			91,64%
		1.03.10.2.0 1.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	46,667	46,667	171.080.006.204	#####			92,45%
		1.03.10.2.0 1.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	10	10	2.095.335.472	1.760.480.718			84,02%
		1.03.10.2.0 1.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	10	10	36.438.847.877	#####			53,70%
		1.03.10.2.0 1.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	####	1041,3	100.000.000	92.194.500			92,19%
		1.03.10.2.0 1.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1,46	1,46	8.646.340.000	7.947.293.130			91,92%
		1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	30	30	22.361.670.604	#####			89,16%
		1.03.10.2.0 1.0048	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Jembatan	1	1	906.775.000	806.898.096			88,99%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil	Persen	8	7	866.500.000	843.293.650			97,32%
		1.03.11.2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang	50	50	400.000.000	391.842.900	Kekurangan tenaga kerja terampil di sektor konstruksi	Program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja	97,96%
		1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	50	50	400.000.000	391.842.900			97,96%
		1.03.11.2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi tersedia	Informasi	10	9	100.000.000	96.913.500	Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi	Pengembangan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi	96,91%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03.11.2.0 2.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	10	10	100.000.000	96.913.500			96,91%
		1.03.11.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase kegiatan jasa konstruksi yang terawasi dan tertib	Persen	8	8	366.500.000	354.537.250	Praktik usaha konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum	Penguatan pengawasan dan penegakan regulasi	96,74%
		1.03.11.2.0 4.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi	10	10	100.000.000	93.706.950			93,71%
		1.03.11.2.0 4.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	10	10	266.500.000	260.830.300			97,87%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Persen	100	100	1.451.785.500	#####			98,18%
		1.03.12.2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	Persen	100	100	951.785.500	942.782.187	Perencanaan tata ruang yang tidak terintegrasi atau bertentangan	Penguatan koordinasi antar instansi terkait	99,05%
		1.03.12.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	951.785.500	942.782.187			99,05%
		1.03.12.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang	Persen	100	100	150.000.000	149.321.879	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan	Penyusunan regulasi pemanfaatan ruang yang jelas dan tegas	99,55%
		1.03.12.2.0 3.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	150.000.000	149.321.879			99,55%
		1.03.12.2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	Persen	100	100	350.000.000	333.259.563	Penyalahgunaan ruang dan lahan yang tidak terkendali	Penyuluhan dan pengawasan penggunaan ruang yang tepat	95,22%
		1.03.12.2.0 4.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	350.000.000	333.259.563			95,22%
- Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel - Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks Persen Nilai	88,25	83,05	24.920.757.560	#####			94,50%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	1.03.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun□	Persen	100	100	380.000.000	371.152.786	Pengelolaan anggaran yang tidak efisien atau tidak sesuai prioritas daerah	Penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran yang transparan	97,67%
	Indeks profesionalitas ASN	1.03.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	15.000.000	14.700.000			98,00%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1.03.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	30	350.000.000	341.852.786			97,67%
		1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	15.000.000	14.600.000			97,33%
		1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	Layanan	10	10	21.270.295.000	#####	Pengelolaan keuangan yang tidak transparan atau tidak akuntabel	Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai standar	93,92%
		1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	218	218	21.270.295.000	#####			93,92%
		1.03.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya terdata	Persen	100	100	40.000.000	39.715.100	Pengelolaan barang milik daerah yang tidak efisien atau tidak terdata	Penerapan sistem administrasi barang yang transparan	99,29%
		1.03.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	40.000.000	39.715.100			99,29%
		1.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana Persentase kebutuhan rumah tangga perangkat daerah tersedia	Persen	100	100	661.400.000	620.105.082	Administrasi yang lambat dan tidak efektif	Peningkatan efisiensi dan sistem administrasi yang baik	93,76%
		1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	36.900.000	33.908.324			91,89%
		1.03.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	98.609.000			98,61%
		1.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	94.500.000	90.232.350			95,48%
		1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	80.000.000	76.127.000			95,16%
		1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	20	50.000.000	33.842.270			67,68%
		1.03.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000	141.821.650			94,55%
		1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	650	650	150.000.000	145.564.488			97,04%
		1.03.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.774.562.560	#####	Kekurangan sumber daya penunjang atau tidak terorganisir	Penyusunan anggaran dan koordinasi yang lebih baik	98,98%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	% Capaian
		1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	280.000.000	266.634.065			95,23%
		1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.494.562.560	1.489.739.360			99,68%
		1.03.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	Persen	87	87	794.500.000	786.069.253	Kerusakan barang milik daerah atau kurangnya pemeliharaan	Penerapan pemeliharaan yang rutin dan terjadwal	98,94%
		1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	299.500.000	295.509.985			98,67%
		1.03.01.2.0 9.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	35	35	300.000.000	298.660.955			99,55%
		1.03.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-			0,00%
		1.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	45.000.000	43.956.500			97,68%
		1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	75.000.000	74.314.543			99,09%
		1.03.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	200	200	75.000.000	73.627.270			98,17%